BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Sejak zaman pejajahan Belanda, pemungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama *De Inspective Emantiem* yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan Undang-Undang *colonial* Belanda yang berlaku pada saat itu dan hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pada waktu penyerahan pemerintah penjajahan Belanda kepada pemerintah Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka nama *De Inspective Emantiem* diganti menjadi *Zaimuda*, yaitu suatu badan dibawah pemerintah Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Namun *Zaimuda* tidak bertahan lama karena jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat kekosongan kekuasaan itu, Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama *Zaimuda* diganti dengan "Inpeksi Keuangan" yang berkedudukan di Concordia (Gedung Merdeka) jalan raya barat (sekarang jalan Asia Afrika). Inpeksi keuangan Bandung meliputi daerah swantara tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, pasukan Belanda menguasai wilayah Bandung Utara, sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah selatan. Oleh karena itu, inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Soreang (Bandung Selatan) agat tidak menggangu keamanan. Tetapi akibat revolusi yang berkepanjangan maka peperangan tidak dapat dihindarkan, dan pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II pada tanggal pada tanggal 19 Desember 1948, ibukora RI yang pada saat itu berada di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut, maka kantor inspeksi Keuangan Bandung pindah ke Tasikmalaya. Dengan keadaan tersebut maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Aliran *Cooperatif*

   Kelompok ini berkerja sama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya.

2. Aliran *Non cooperative*

   Kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, maka kantor inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan kantor inspeksi Keuangan yang berada di Bandung, yaitu di Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya di sebelah Hotel *Savoy Homan*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965

kantor inspeksi Keunagan Bandung (termasuk kantor Inspeksi keunagan lainnya di Indonesia), berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah wewenangnya meliputi daerah Swantara Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung, sementara Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang yang berkedudukan di Karawang. Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi pada tahun 1967 menjadi :

1. Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi: Kota Praja Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang meliputi: Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan berkembangnya penduduk di berbagai bidang dan perkembangan pembangunan di berbagai sector, khususnya di Kota Bandung, maka Inspeksi Pajak ini dipecah lagi menjadi dua Inspeksi Pajak yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jala Asia Afrika no. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.

Sesuai Surat Keputusan Menkeu RI No. 276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Pajak di Indonesia namanya berubah menjadi “Kantor Pelayanan Pajak”. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan

Menkeu RI No. 561/KMK.01/1992, tanggal 21 Mei 1992, Organisasi Direktorat Jendral Pajak diadakan reorganisasi menjadi 120 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan jumlah KPP di Kodya Bandung menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, terdiri dari:

Table 2.4

Kantor Pelayanan Pajak Kodya Bandung Tahun 1992

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Timur	Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
2	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tengah	Jalan Purnawarman No.21 Bandung
3	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Barat	Jalan Soekarno-Hatta Bandung
4	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cimahi	Jalan Raya Barat Cimahi

Sumber : KPP Pratama bandung karees

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara selektif dan efisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 756/KMK.01/1993, tanggal 3 Agustus 1993, yang disempurnakan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994, tanggal 29

Maret 1994 serta penyesuaian dengan wilayah Pemerintah Tingkat II Kota madya Bandung, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Madya Bandung dilakukan pemecahan kembali menjadi 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

Table 2.5

Kantor Pelayanan Pajak Kodya Bandung Tahun 1994

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees	Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
2	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying	Jalan Purnawarman No.21 Bandung
3	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegallega	Jalan Soekarno-hatta No. 216 Bandung
4	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bojonagara	Jalan Cipaganti No. 157 Bandung
5	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi	Jalan Raya Barat Cimahi

Sumber : KPP Pratama bandung karees

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu RI No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2002, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002, KPP di Bandung dibagi menjadi :

Table 2.6

Kantor Pelayanan Pajak Kodya Bandung Tahun 2002

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees	Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
2	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying	Jalan Purnawarman No.21 Bandung
3	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegallega	Jalan Soekarno-hatta No. 216 Bandung
4	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bojonagara	Jalan Cipaganti No. 157 Bandung
5	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cicadas	Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung
6	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi	Jalan Raya Barat Cimahi

Sumber : KPP Pratama bandung karees

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007, tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroprasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II tanggal

28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, KPP di Bandung dibagi menjadi :

Table 2.7

Kantor Pelayanan Pajak Kodya Bandung Tahun 2007

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees	Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
2	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying	Jalan Purnawarman No.21 Bandung
3	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegallega	Jalan Soekarno-hatta No. 216 Bandung
4	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bojonagara	Jalan Cipaganti No. 157 Bandung
5	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cicadas	Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung

Sumber : KPP Pratama bandung karees

Adapun wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees meliputi:

1. Kecamatan Kiaracondong
2. Kecamatan Batununggal
3. Kecamatan Lengkong
4. Kecamatan Regol

5. Kecamatan Bandung Kidul

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggungjawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga.

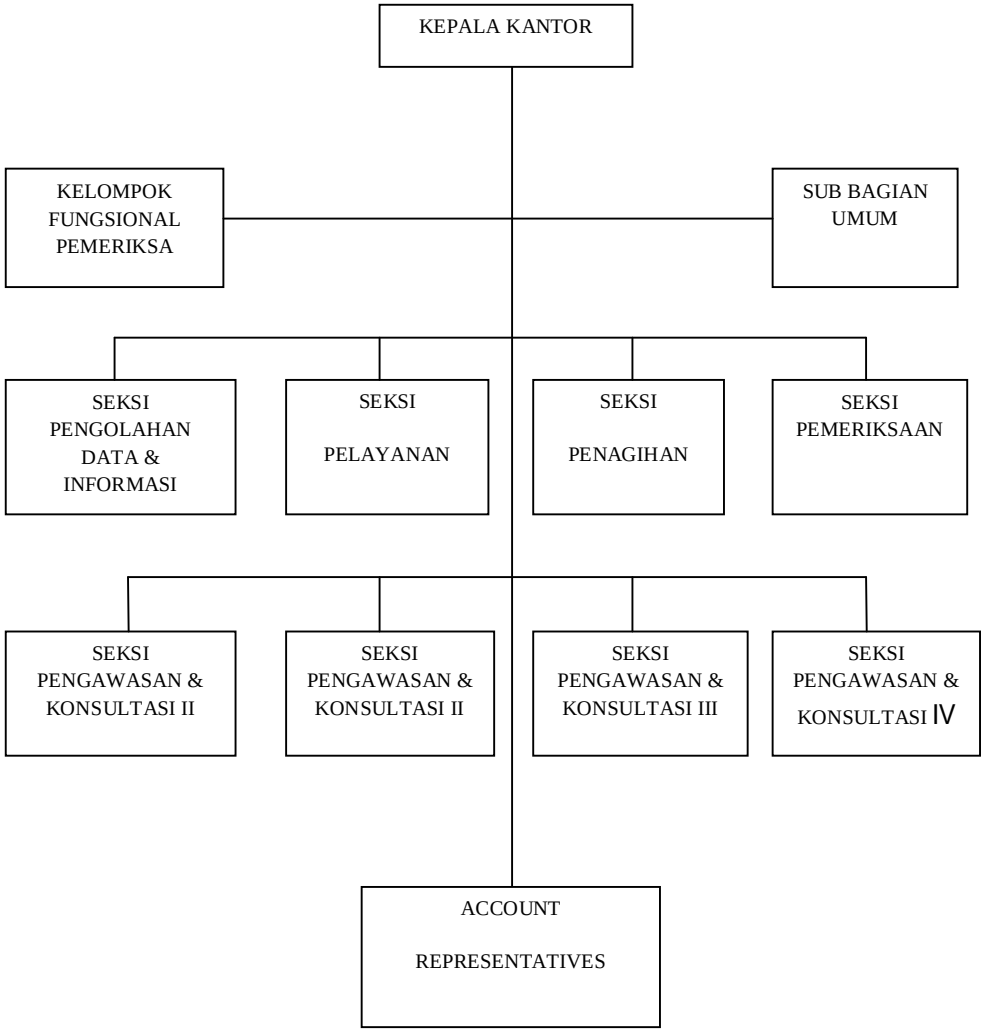
Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau staf. Dengan demikian, sangat jelas tampak adanya pemisah fungsi sehingga tidak terjadi saling menyalahkan dan saling menghambat yang dapat timbul karena pengorganisasian yang kurang baik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan kantor pajak yang memiliki pembagian tugas atau jabatan sesuai dengan kantor pelayanan pajak lainnya. Namun dalam pelaksanaanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dikenal oleh masyarakat yang selalu sigap dalam membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran pajak, dengan keramahan dalam pelayanan sehingga wajib pajak merasa nyaman dan terpuaskan.

Dalam pelaksanaanya sebagai lembaga keuangan negara atau pemerintah, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees membuat struktur organisasi sebagaimana terlampir, namun dalam proses praktek kerja penulis di tempatkan pada sub bagian Pelayanan.

STUKTUR ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES



Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Karees

2.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di KPP Pratama Bandung Karees terdapat beberapa bagian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan perpajakan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan :

- Penyuluhan
- Pelayanan
- Pengawasan (pemeriksaan dan penagihan)

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
2. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling, dan penyiapan laporan kinerja.
4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, dan melaksanakan evaluasi hasil banding.
6. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainya.
7. Seksi penagihan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional penilaian dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Bagian Seksi Pelayanan merupakan salah satu bagian penting di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung-Karees untuk melaksanakan kegiatan pengadministrasian perpajakan.

Berikut ini merupakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh bagian Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung-Karees :

1. Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
3. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.

4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan.